

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI di proklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa di masa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa Sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika di bandingkan jumlah kota dan desa perbandingannya akan lebih besar jumlah desa di banding kota.

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkain usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana kearah yang lebih baik. Sedangkan tujuan dari pembangunan adalah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, Makmur, dan sejahtera baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut di jabarkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-sebesarnya kesejahteraan Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan, maka dalam pelaksanaannya sangat di tunjang oleh manajemen dan organisasi yang baik, karna dalam manajemen terkandung unsur perencanaan yang terorganisasi dengan baik. Tanpa adanya

rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka usaha pencapaian.

Dalam rangka pembangunan Desa yang menyeluruh, terpadu dan terprogram, untuk mencapai sasaran dan tujuannya selain di tunjang oleh, manajemen pemerintah desa yang bersangkutan. Efektifitas pembangunan merupakan suatu ukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan efektifitas pembangunan tersebut maka dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam pembangunan Desa itu sendiri sangat berarti. Pada hakekatnya pembangunan adalah upaya perbaikan secara terencana dari satu situasi kesituasi lainnya yang di anggap lebih baik. (Syaukani:2004) Efektifitas pembangunan merupakan suatu ukuran bagi tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Pembangunan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi suatu Negara. Tujuan pembangunan sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu pembangunan di laksanakan secara terus-menerus sebagai suatu proses agar mampu tercapai keadaan masyarakat yang semakin baik. Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, selama ini banyak program pembangunan yang di lakukan di Desa di rancang oleh pemerintah.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, Negara Indonesia terdiri atas daerah Provinsi yang terdiri dari beberapa Kabupaten/kota, sedangkan daerah kabupaten/kota terdiri atas Desa dan kelurahan yang merupakan satuan pemerintahan terendah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara Indonesia baik sebagai alat untuk mencapai tujuan negara maupun sebagai sebuah Lembaga yang memperkuat struktur pemerintah Negara, sebagai alat dalam mencapai tujuan nasional, dan juga desa dapat menjangkau sasaran yang akan di sejahterakan karna merupakan agen terdepan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun kabupaten/daerah. (Nurcholis, 2011:2). Posisi desa yang strategis yaitu berhubungan langsung dengan masyarakat, dapat di pastikan bahwa setiap program pembangunan yang berasal dari pemerintah akan Kembali ke desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada masa pemerintah orde baru, sistem sentralisasi masih terlihat kuat dalam kebijakan di buat terkait dengan Desa. Dan dengan sistem sentralistik ini perencanaan pembangunan berada di tangan pemerintah pusat. Proses dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan di lakukan dari atas ke bawah atau top-down planning and development (Adisasmita, 2011:1)

Adanya sistem sentralistik ini membuat pembangunan Desa cenderung di laksanakan seragam oleh pemerintah pusat. Padahal keadaan setiap desa itu sangat berbeda-beda. Kekuasaan yang di miliki oleh pemerintah pusat pada masa kini sangat mendominasi. (Adisasmita, 2011:3) Pembangunan di laksanakan secara top-down di mana masyarakat yang seharusnya menjadi subyek pengelola program justru menjadi obyek penerima dari program yang di rancang.

Berbeda dengan pembangunan pada masa reformasi di mana pembangunan di laksanakan secara bottom-up. Dalam hal ini, pembangunan lebih di serahkan kepada Desa itu sendiri. Desa mulai di beri kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pada masa orde baru sampai dengan reformasi, pembangunan desa telah mengalami berbagai perubahan istilah, antara lain yaitu Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), Pembangunan Desa (Bangdes), dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Semua istilah tersebut sebenarnya merujuk pada pembangunan Desa. (Muhi, 2011:2)

Pembangunan Desa merupakan kegiatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat Desa dengan berbagai pembangunan di Desa sehingga sekarang wajah Desa bisa sedikit berubah karna ada program pembangunan Desa masyarakat sekarang bisa menikmati program-program pemerintah Desa salah satunya adalah pembangunan water closet sehat di Desa Kuenek Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, serta untuk meningkatkan kualitas hidup dan untuk penanggulangan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karna itu, salah satu usaha untuk meningkatkan pembangunan Desa sesuai yang di amatkan Undang-Undang Desa dapat di lakukan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk mengelolah daerahnya sendiri secara mandiri.

Hal ini sesuai dengan yang di amatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Desa memiliki wewenang

untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai Prakarsa masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Desa sebagai otonom memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa sendiri yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Desa Kuanek adalah salah satu Desa di kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada tahun 2021 salah satu program kerja Desa adalah pembangunan water closet sehat di Desa Kuanek dengan harapan bersama antara pihak pemerintah desa dan juga masyarakat bahwa harus terealisasi dan sudah bisa di gunakan pada tahun 2022 dengan rencana pembangunan yang sudah di tentukan. Namun pada realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi atau yang di harapkan bersama karna salah mengelolah keuangan dan akhirnya terbangkalilah pembangunan water closet sehat tersebut dan sekarang ada beberapa masyarakat yang sudah menggunakan water closet tersebut namun tidak sesuai dengan rencana pembangunan atau kalender kerja yang sudah di tentukan dalam program tersebut di Desa Kuanek Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara dan yang menjadi korban dari terbangkalai pembangunan water closet sehat adalah masyarakat Desa dan kususnya untuk masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

Mekanisme pembangunan di lakukan sesuai kalender kerja, pembangunan berawal dari perencanaan yakni dalam; Musdus dan Musdes sudah di rencanakan berapa unit, Pelaksanaan yakni setelah pencairan dana Desa langsung kita musyawarah bersama sasaran penerima water closet sehat dan pemerintah berikan

rencana pembangunan anggaran serta denah water closet dalam pelaksanaan pembangunan water closet sesuai dengan kalender kerja dan di rencanakan paling lambat 90 hari pada tahun 2021 ada 10 Unit water closet sehat di desa Kuanek.

Mekanisme Pembangunan water closet di Desa Kuanek

Luas: Ukuran

*Septiteng (Pembuangan) 2 meter x 1,5 meter

*Ukuran Luas Ruangan: 2,5 meter x 1,5 meter

*Tinggi Tembok Bagian Depan :2, 25 meter

*Tinggi Tembok Bagian Belakang :2 Meter

*Teras Depan :2,5 meter x 1,5 meter

*Pembuangan Belakang:1,5 meter

Sumber Dana (bersumber pada dana desa) yang di salurkan melalui pemerintah daerah dalam hal ini dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Anggaran perunit (11 juta 140 rb) dan di kalikan dengan 10 unit water closet sehat maka anggaran yang di gunakan untuk 10 unit adalah (111 juta 400rb) yang di gunakan dalam Pembangunan water closet sehat pada tahun anggaran 2021 dari dana desa.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran dana Desa yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada tahun anggaran 2021 prioritas penggunaan dana desa masih di

utamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan Observasi dan wawancara yang saya lakukan bersama ketua BPD dan masyarakat yang menerina bantuan pembangunan water closet sehat dan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah bahwa harus terrealisasi pada bulan September 2022. Namun sampai saat ini juga kebijakan tersebut belum juga terlaksanakan dengan baik dan peneliti juga menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terbangkalainya pembangunan water closet sehat tersebut antara lain: Perencanaan yang kurang matang, Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan atau kalender kerja.

1.2.Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimanakah peran pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan water closet sehat?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang di rumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Tujuan Penelitian

Peneliti ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai peran pemerintah Desa dalam pembangunan water closet sehat.

2. Manfaat Peneliti

1.) Manfaat Teoritis

Peneliti ini mengkaji teori tentang peran pemerintah Desa dalam pembangunan water closet sehat.

2.) Manfaat Praktis

Peneliti ini mendefinisikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Desa agar memperlakukan peran pemerintah Desa dalam pembangunan water closet sehat.